



LAPORAN PENELITIAN  
DOSEN MUDA TAHUN ANGGARAN 2003

KK  
KKB  
959.8021  
Mur  
p.

**PEMBANTAIAN ETNIS CINA DI HINDIA BELANDA PADA  
MASA KEKUASAAN GUBENUR JENDERAL ANDRIAN  
VOLCKENIER TAHUN 1740-AN**

Oleh:

Drs. M u r y a d i  
Drs. Sukaryanto, M.Si.



\*004804141\*



004804141

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi  
DIP Nomor : 006/XXIII/1/--/2003 Tanggal 1 Januari 2003  
Kontrak Nomor : 032/P4T/DPPM/PDM/III/2003  
Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti, Depdiknas  
Nomor Urut 30

FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2003



## LEMBAGA PENELITIAN

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional         | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional             | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      | 10. Puslit Kesehatan Reproduksi                  |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga                   |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)   | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

### LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA

1. a. Judul Penelitian	: Pembantaian Etnis Cina di Hindia Belanda Pada Masa Kekuasaan Gubernur Jenderal Andrian Volckenier Tahun 1740-an
b. Kategori Penelitian	: I / II / III
2. Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap dan Gelar	: Drs. Muryadi
b. Jenis Kelamin	: Laki-laki
c. Pangkat/Golongan/NIP	: Penata/ IIIC
d. Jabatan Fungsional	: Lektor
e. Fakultas/Puslit./Jurusan	: Sastra/ Ilmu Sejarah
f. Univ./Inst./Akademi	: Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang Diteliti	: Sejarah
3. Jumlah Tim Peneliti	: 2 Orang
4. Lokasi Penelitian	: Surabaya
5. Kerjasama dengan Institusi Lain	: -
a. Nama Instansi	:
b. Alamat	:
6. Masa Penelitian	: 4 bulan
7. Biaya yang Diperlukan	: Rp 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah )

Surabaya, 10 November 2003

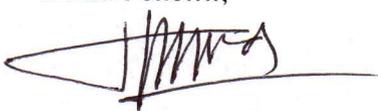
Mengetahui :

Dekan Fakultas/Puslit Sastra

  
Drs. Heru Supriyadi

NIP. 131696449

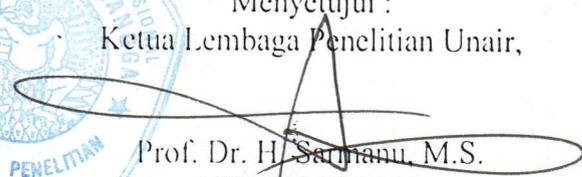
Ketua Peneliti,

  
Drs. Muryadi

NIP. 132090176

Menyetujui :

Ketua Lembaga Penelitian Unair,

  
Prof. Dr. H. Saemanu, M.S.

NIP. 130 701 125

**RINGKASAN**  
**PEMBANTAIAAN ETNIS CINA DI HINDIA BELANDA PADA MASA**  
**KEKUASAAN GUBERNUR JENDERAL ANDRIAN VOLCKENIER TAHUN**  
**1740-AN**

(Muryadi, Sukaryanto, 2003, 45 halaman)

Penelitian sejarah ini membahas mengenai pembantaian etnis Cina di Hindia Belanda pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Andrian Volckenier pada tahun 1740-an. Ada tiga masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yakni: (1) Bagaimanakah kebijaksanaan-kebijaksanaan politik dan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah Hindia Belanda (VOC) dalam hubungannya dengan etnis Cina? (2) Latar belakang apakah yang menyebabkan pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Andrian Volckenier sampai terjadi peristiwa pembantaian terhadap etnis Cina pada tahun 1740-an? (3) Tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan apa saja yang ditempuh oleh Pemerintah Hindia Belanda pasca pembantaian?

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan : pertama, memahami hubungan antara Pemerintah Hindia Belanda (VOC) dengan etnis Cina pada masa kolonial di Indonesia. Kedua, memahami kebijaksanaan-kebijaksanaan politik dan ekonomi yang ditempuh Gubernur Jenderal Andrian Volckenier dalam hubungannya dengan etnis Cina. Ketiga, memahami penyebab dari terjadinya pembantaian terhadap etnis Cina pada tahun 1740-an. Keempat, memahami dampak dari peristiwa pembantaian etnis Cina pada tahun 1740-an terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan colonial pada masa-masa berikutnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah (historis), yang memiliki lima tahap, yakni: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi, (4) interpretasi, dan (5) penulisan. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini kebanyakan berupa sumber-sumber sekunder.

Dari penelitian ini, hasil-hasil yang ditemukan dapat diungkapkan sebagai berikut: *Pertama*, dalam hubungannya dengan etnis Cina, kebijaksanaan VOC selalu berubah-ubah. Pada awalnya hubungan antara etnis Cina dengan Kumpeni Belanda sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari perlakuan-perlakuan maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Kumpeni khususnya di bidang perdagangan. Untuk mendorong roda perekonomian terutama di Batavia, VOC berusaha untuk menarik pedagang-pedagang Cina ke wilayah ini. Dengan adanya kemudahan-kemudahan tidak mengherankan banyak pendatang orang-orang Cina ke Indonesia. *Kedua*, dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh VOC, maka etnis Cina akhirnya banyak menguasai perekonomian di Indonesia, bahkan dapat mengalahkan perekonomian orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Kondisi yang demikian inilah yang kemudian menyebabkan munculnya rasa tersaingi dan iri di kalangan Kumpeni. Oleh karena itu maka kemudian VOC berusaha untuk mengetrapkan berbagai peraturan dan tindakan yang bertujuan untuk membatasi masuknya emigran Cina yang terus bertambah dan membatasi perdagangan etnis Cina. Kebencian terhadap orang-orang Cina ini mencapai puncaknya dengan terjadinya pembantaian massal terhadap etnis Cina pada tahun 1740-an. *Ketiga*, tindakan pembantaian terhadap etnis Cina pada tahun 1740-an merupakan tindakan paling kejam dalam sejarah hubungan antara antara VOC dengan etnis Cina di Indonesia. Tindakan ini

merupakan titik awal terjadinya tindakan yang menjurus pada rasialisme terhadap orang-orang Cina di Indonesia. Bukan hanya pada saat kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda bahkan sampai sekarang. *Keempat*, dampak yang paling besar dan terasa pasca pembantaian terhadap etnis Cina ini adalah dengan dikeluarkannya dua peraturan yaitu *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel*. Kedua peraturan ini intinya membatasi aktivitas dan gerak orang Cina di Indonesia. Kedua peraturan ini dampaknya masih sangat terasa terus hingga sekarang meskipun Indonesia sudah lama merdeka.

(Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Airlangga, Nomor: 032/ P4T/ DPPM/ PDM/ III/ 2003 Ditjen Dikti, Depdiknas)

**SUMMARY****BUTCHERING OF CHINESE ETHNIC IN NETHERLAND EAST INDIES AT  
GOVERNOR GENERAL ANDRIAN VOLCKENIER PERIOD IN 1740s****(Muryadi, Sukaryanto, 2003, 45 pages)**

This research discusses the butchering of Chinese ethnic in Netherland East Indies at Governor general andrian Volckenier period in 1740s. There are three problems to be discussed in this research: (1) how political and economic policies that pursues Netherlands Indies Government (VOC) are related to Chinese ethnic; (2) what the underlying reasons are causing the butchering of Chinese ethnic at Governor General Andrian Volckenier period in 1740s? (3) what actions are taken by Netherlands Indies Government after the butchering?

The purpose of this research is mainly to understand a relationship between Netherlands Indies Government and Chinese ethnic at the colonial period in Indonesia, to understand the political and economic policies that Governor General Andrian Volckenier implements in relation to Chinese ethnic, to understand the underlying reasons of the butchering of Chinese ethnic in 1740s, and to understand the impact of the butchering on the subsequent colonial policies.

This is using a historical method, consisting of five stages: (1) selection of topic, (2) collection of sources, (3) verification, (4) interpretation, and (5) writing. The source is including secondary sources.

The results showed the following. First, in associated with the Chinese ethnic, VOC's policies always changed. At the beginning, relationship between Chinese ethnic and Netherlands Indies Government was good enough. This could be seen in good treatment or ome facilities provided by the VOC particularly in trade areas. To encourage economic activities particularly in Batavia, VOC tried to attract some Chinese people came to Indonesia. Second, due to these favorable facilities provided by VOC, then Chinese people dominated Indonesian economy, even more superior than Netherlands people present in Indonesia did at that time. This condition lead to the rising of

competition among them. Therefore, VOC attempted to apply some rules and restrictions to discourage the entry of Chinese emigrants and to restrain Chinese trading. Hatred against the Chinese people culminated at the butchering of Chinese people in 1740s. Third, the butchering of Chinese people in 1740s was the cruelest actions in history of relationship between VOC and Chinese people in Indonesia, even until recent time. Fourth, the greatest impact of the butchering was passing of two regulations namely *Wijkenstelsel* and *Passenstelsel*. These two regulations were purposively designed to restrain activity and movement of Chinese people in Indonesia. This was still felt apparently until today although Indonesia has been independent for along time.

(Department of History, Faculty of Letters Airlangga University, Number: 032/P4T/DPPM/PDM/III/2003 Ditjen Dikti, Depdiknas)



## KATA PENGANTAR

Volkenier:1740  
Seperti Nero,  
Ia duduk di veranda  
Sambil memainkan lyra  
Dan membiarkan lidah api  
Menari di perkampungan orang Cina

(Zeffry J. Alkatiri, 1999)

Penelitian yang berjudul: *Pembantaian Etnis Cina di Hindia Belanda pada Masa Kekuasaan Gubernur Jenderal Andrian Volckenier Tahun 1740-an*, ini berawal dari keprihatinan peneliti terhadap “permasalahan Cina” di Indonesia yang hingga saat ini sering muncul dalam bentuk gerakan-gerakan rasialisme yang disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, pemerkosaan, dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya terhadap etnis Cina.

Selama ini kajian tentang sikap permusuhan tersebut umumnya lebih menekankan pada analisa politik yang bertumpu pada latar belakang dominasi peranan orang Tionghoa dalam ekonomi Indonesia. Akibatnya dalam menjelaskan permusuhan anti-Cina cenderung berfokus dalam konteks politik kontemporer sehingga orang lebih cenderung tertarik untuk melakukan improvisasi dalam memandang persoalan tanpa mencoba mengkaji dari sudut pandang atau perspektif sejarah kehidupan bangsa.

Kasus pembantaian terhadap etnis Cina pada masa kolonial ini merupakan peristiwa yang sangat besar dalam sejarah etnis Cina di Indonesia, bahkan dampak-dampaknya hingga saat ini masih mewarnai dalam kehidupan mereka.

Penelitian ini dapat terlaksana karena bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pimpinan Bagian DP3M Dirjen Dikti Depdiknas yang telah memberikan kepercayaan dan kesediaan mendanai penelitian ini;
2. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah membantu proses pelaksanaan penelitian ini;
3. Pembantu Dekan I Fakultas Sastra Universitas Airlangga yang telah memberi rekomendasi untuk mengajukan proposal penelitian ini;
4. Anggota peneliti yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam penelitian ini;
5. Istriku dan anakku yang selalu memberi semangat untuk mengerjakan penelitian ini.

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan dan disertai dengan ucapan banyak terima kasih.

Surabaya, November 2003

Ketua Peneliti

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	i
RINGKASAN.....	ii.
SUMMARY.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Permasalahan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	10
BAB IV METODE PENELITIAN.....	12
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	15
5.1 Sejarah Masuknya Orang Cina dan Aktivitas Perdagangannya di Indonesia.....	15
5.2 Kebijakan-Kebijakan VOC terhadap Orang Cina.....	19
5.3 Penyebab Pembantaian Etnis Cina Tahun 1740-an.....	22
5.4 Jalannya Pembantaian.....	28
5.5 Tindakan-Tindakan Penyelesaian dan Kebijakan VOC terhadap Etnis Cina Pasca Pembantaian.....	32
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN.....	46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu etnis yang paling sering mendapat sasaran tajam di Indonesia adalah etnis Cina. Sasaran tajam ini kebanyakan berlatar belakang dari adanya kesenjangan di bidang ekonomi. Etnis ini dianggap menguasai mayoritas perekonomian di Indonesia, meskipun mereka merupakan kelompok pendatang. Kecemburuan terutama di bidang ekonomi inilah yang sering kali menimbulkan konflik horizontal di antara kelompok pribumi dan nonpribumi ini.

Konflik atau kerusuhan-kerusuhan anti-Cina sangat potensial terjadi di Indonesia. Ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat menyala apabila ada angin bertiup sedikit saja. Kalau melihat sejumlah kekerasan yang berawal dari sejumlah masalah yang dihadapi Indonesia, ada kesan yang ditimbulkan, yaitu setiap terjadi perubahan politik di Indonesia, orang-orang Tionghoa mesti saja menjadi korban. Kerusuhan, perampokan, penjarahan, pembunuhan, dan pemerkosaan akan selalu mengisi lembaran hitam dalam sejarah kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Lembaran-lembaran hitam itu malah semakin bertambah jumlahnya di masa Indonesia merdeka, sehingga memberikan kesan bahwa sikap permusuhan anti-Cina itu berakar kuat di kalangan banyak orang.

Selama ini kajian tentang sikap permusuhan tersebut umumnya lebih menekankan pada analisa politik yang bertumpu pada latar belakang dominasi peranan orang-orang

Tionghoa dalam ekonomi Indonesia. Akan tetapi lebih banyak lagi yang cenderung untuk menjelaskan sikap permusuhan anti-Cina itu berfokus dalam konteks politik kontemporer. Akibatnya, orang lebih tertarik untuk melakukan "improvisasi" dalam memandang persoalan tanpa mencoba mengkajinya dari sudut pandang atau perspektif sejarah kehidupan bangsa ( Lohanda:2002:49).

Sejarah membuktikan bahwa keberadaan etnik Tionghoa di Indonesia sangatlah berperan di dalam mendorong roda perekonomian nasional. Peran penting yang dimainkan etnis ini adalah dengan melakukan transformasi "ekonomi perantara" dari kota sampai ke pelosok desa. Posisi strategis inilah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan mendorongnya menjadi lapisan komersial yang dapat mengisi serta menjaga jarak antara golongan elit Belanda dengan massa rakyat.

Pada tahun 1886 orang Tionghoa, diantara orang Timur lainnya, ditempatkan di bawah yuridiksi undang-undang komersial, yang sebelumnya hanya diperuntukkan untuk bangsa Eropa saja. Dengan ditematkannya orang-orang Tionghoa di bawah undang-undang khusus, terangkatlah status mereka baik secara ekonomi maupun sosial. Kenapa pemerintah Belanda memperlakukannya secara istimewa? Tak lebih karena mereka butuh aliansi dagang permanen, sekaligus "sapi perahan" untuk diperas sebesar-besarnya bagi sumber keuangannya demi menunjang kelangsungan kolonialisme di Indonesia.

Peranan pedagang Cina di Indonesia di beberapa pelabuhan seperti Banten, Jambi, Palembang, dan Malaka sangatlah besar. Kecuali perdagangan rempah-rempah dan lada, mereka juga menjual barang-barang hasil negeri Cina. Banyak keuntungan diperoleh dari perdagangan itu. Setelah VOC mempunyai tempat *rendez-vous* sendiri, yaitu Batavia, politiknya ialah hendak menarik Cina sebanyak mungkin ke Batavia dengan tujuan agar

perdagangan beserta segala keuntungannya masuk ke kantong Kumpeni. Di samping itu kota Batavia memerlukan banyak tenaga pekerja, khususnya bagi pertukangan dan kerajinan. Politik "pintu terbuka" itu lebih-lebih ditempuh sewaktu ada perang dengan Banten. Orang Jawa tidak dipercaya, maka kaum Cina dapat memenuhi kebutuhan itu. Seperti diberitakan dalam *Daghregister* setiap kapal dari Cina membawa ratusan orang penumpang Cina. Pengerahan tenaga itu dipergiat lagi karena aliran koloni Belanda sebagai *vrijburger* (warga bebas) sangat kecil. Sebagai akibat blokade Banten banyak Cina pindah ke Batavia. Pada tanggal 7 Oktober 1619 ada 3 sampai 400 orang Cina, 31 Juli 1620, 800 orang, 26 Oktober 1620, 850 sampai 900 orang (Kartodirdjo, 1992:220).

J.P. Coen sangat menghargai mereka dan memberikan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan bangsa Barat. Sebagai pemimpin pertama diangkatlah So Beng Kong, jabatan mana kemudian disebut Kapten Cina. Pada akhir abad XVII dan awal abad XVIII jumlah orang Cina semakin meningkat. Spelman banyak menarik Cina dari Banten, lagi pula pergolakan di negeri Cina Selatan menambah aliran migrasi keluar dari negeri itu. Pada akhir abad XVII pelayaran jung dari Cina membawa banyak migran lagi sehingga VOC perlu mengadakan pembatasan. Karena dalam pelaksanaan peraturan itu masih banyak dilakukan penyelewengan oleh opsir Cina dan pegawai Kumpeni maka aliran masuk masih tetap besar. Pada tahun 1696 setiap penumpang yang tak dikenal dikenakan 15 ringgit, kemudian pada tahun 1706 jung besar boleh membawa 100 dan yang kecil 80 penumpang, sedang yang pertama dikenakan pembayaran seribu ringgit dan yang kecil 500 ringgit. Meskipun demikian karena perdagangan barang-barang dari Cina sangat menguntungkan maka bersama dengan aliran perdagangan itu banyak orang Cina datang ke Batavia. Pada pemerintahan Van Swal aliran itu dapat dihentikan antara

lain dengan menurunkan harga teh, sehingga jung Cina tidak lagi datang mengimpor ke Batavia. Akibat lain ialah bahwa VOC sendiri menderita kerugian karena kehilangan pembayaran bea masuk, lagi pula harga teh menjadi lebih mahal sehingga keuntungan yang didapat di Eropa menjadi berkurang. Sejak 1723 politik perdagangan VOC berubah, mulai mementingkan perdagangan dengan Cina lagi, maka migrant-migran Cina mulai mengalir lagi. Pada tahun 1719 tercatat penduduk Cina 7550 dan pada tahun 1739 sudah menjadi 10.574. Di antara pendatang terdapat pula tukang dan pekerja biasa, maka tak mengherankan apabila kemudian keamanan terganggu dengan adanya pencurian, perampokan, dan kejahatan lain. Sementara itu peranan ekonomi Cina di Batavia menjadi sangat penting, antara lain sebagai pemborong dan penyewa atau penebas.

Di luar Batavia VOC banyak menggunakan jasa-jasa Cina, bahkan di beberapa pelabuhan diangkatlah orang Cina sebagai syahbandar misalnya di Semarang dan di Surabaya.

Dalam menghadapi kompetisi bangsa Cina *vrijburgers* Belanda tidak dapat menandingi sehingga mudah timbul perasaan tidak senang atau sikap rasialistis (Kartodirdjo, 1992:221). Terlepas dari insiden-insiden yang kadang terjadi antara golongan-golongan, sekitar tahun 1740 suasana sudah menunjukkan rasa tak senang terhadap Cina. Puncak dari ketegangan ini adalah dengan terjadinya peristiwa pembantaian terhadap etnis Cina yang terjadi pada tahun 1740-an.

## 1.2 Permasalahan Penelitian

Penelitian yang menggunakan pendekatan historis ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijaksanaan-kebijaksanaan politik dan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah Hindia Belanda (VOC) dalam hubungannya dengan etnis Cina?
2. Latar belakang apakah yang menyebabkan pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Andrian Volckenier sampai terjadi peristiwa pembantaian terhadap etnis Cina pada tahun 1740-an?
3. Tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan apa saja yang ditempuh oleh Pemerintah Hindia Belanda pasca pembantaian?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Mona Lohanda (2002:49) selama ini kajian tentang sikap permusuhan terhadap etnis Cina umumnya lebih menekankan pada analisa politik yang bertumpu pada latar belakang dominasi peranan orang Tionghoa dalam bidang ekonomi di Indonesia. Akan tetapi lebih banyak lagi yang cenderung untuk menjelaskan sikap permusuhan anti-Cina itu berfokus dalam konteks politik kontemporer. Akibatnya, orang lebih tertarik untuk melakukan ‘improvisasi’ dalam memandang persoalan tanpa mencoba mengkajinya dari sudut pandang atau perspektif sejarah kehidupan bangsa.

Sementara itu mengenai hubungan antara orang Cina dengan penduduk pribumi, de Graaf (1998:79) menggambarkan bahwa pada suatu masa ratusan tahun yang silam antara dua etnis tersebut pernah punya hubungan yang begitu akrab dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pada awalnya fasilitas-fasilitas perdagangan menengah dan kecil biasanya dipegang oleh orang Cina dan pribumi, sedang fasilitas-fasilitas perdagangan yang besar dipegang oleh orang-orang bangsa Eropa. Hubungan antara pihak pemerintah kolonial dengan orang-orang Cina menurut Dukut (2001:8) ternyata tidak selamanya berjalan damai. Hal ini dapat dibuktikan dengan terjadinya konflik-konflik, bahkan pembantaian terhadap orang-orang Cina. Tidak sedikit Gubernur Jenderal yang berkuasa membuat kebijaksanaan yang ditujukan untuk menghalangi kemajuan dari etnis Cina ini.

Referensi otentik tentang fenomena rasialisme anti-Cina di Indonesia dapat ditemukan diantaranya dalam disertasi Jan Risconi berjudul: *Sjair Kompeni Welanda*

*Berperang dengan Tjina*, yang menyebutkan bahwa rasialisme anti-Cina terbesar dan pertama kali, yang terjadi pada tahun 1740 jelas merupakan hasil permainan kekuasaan Kumpeni Belanda atau VOC (Jan Risconi dalam Pramoedja Ananta Toer, 2000).

Menurut Vermeulen, terjadinya pembantaian terhadap etnis Cina yang menimbulkan pertumpahan darah disebabkan pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda lemah sekali karena adanya perpecahan di dalamnya, sementara kepala pemerintahannya adalah orang-orang yang bimbang serta kurang bijaksana (Vermeulen, dalam Twan Djie, 1995:34). Sementara itu Verboeket melihat sebagai sebab yang lebih dalam lagi dari pembunuhan besar-besaran itu ialah ketakutan orang-orang Belanda sebagaimana juga ketakutan orang-orang Spanyol hampir dua abad yang lalu di Filipina akan "kesukaran politik" yang dihadapinya, yakni cepatnya bertambah jumlah orang Cina (Verboeket, dalam Twan Djie, 1995:34).

Sementara itu menurut Alwi Shahab (2002:88), kisah huru-hara dan pembantaian yang menewaskan sekitar 5 ribu hingga 10 ribu warga Tionghoa, terjadi tahun 1740-an pada masa Gubernur Jenderal Adrian Volckenier karena ia mengenakan bermacam-macam peraturan untuk mempersukar ekonomi orang Tionghoa.

Menurut Sartono (1992:221), dalam hal ini ternyata politik VOC terhadap perdagangan Cina berubah-ubah dan disesuaikan dengan situasi tertentu. Dalam menghadapi kompetisi bangsa Cina, *vrijburgers* Belanda tidak dapat menandingi sehingga mudah timbul perasaan tak senang atau sikap rasialistis, akan tetapi tidak dikenal diskriminasi. Terlepas dari insiden-insiden yang kadang-kadang terjadi antara golongan-golongan sekitar tahun 1740 suasana sudah menunjukkan rasa tak senang terhadap orang Cina.

Sementara itu menurut Aminuddin Kasdi peranan Cina dalam bidang perekonomian dan perdagangan Asia Pasifik pada abad ke-17 hingga ke-18 menjadi sangat penting karena mereka dengan jung-jungnya itu memiliki jaringan dagang antar-pulau di Nusantara dan sekitarnya. Bahkan peranan mereka sangat menonjol dalam perdagangan antara Indonesia, Cina, dan Jepang. Dapat dikatakan hampir semua kegiatan bisnis atau perniagaan berada dalam dominasi Cina. Hal itu selain menjadikan daya tarik bagi orang Cina lainnya untuk mengadu nasib di Batavia sekaligus merupakan faktor pemicu timbulnya kecemburuan dari kelompok penduduk lain, khususnya dari kalangan Belanda. Akibat ini akan terbukti pada huru-hara yang terjadi pada akhir 1740 ( Kasdi, 2003:308-309)

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan pembantaian terhadap etnis Cina ini adalah Teori Kesenjangan Sosial atau Teori Ketidakadilan Sosial. Teori ini berusaha untuk menguraikan bagaimana kesenjangan sosial itu telah menciptakan jarak sosial antara kelompok-kelompok yang berbeda itu. Jarak ini melahirkan ketimpangan informasi dan komunikasi yang terhambat yang menyebabkan mudah munculnya isu-isu negatif. Isu-isu inilah yang menjadi pemicu bagi tindak kekerasan.

Psikologi sosial mencoba membantu menjelaskan kejadian ini dengan menekankan diri pada Teori Prasangka. Prasangka timbul diantara dua kelompok sosial yang tak mengalami komunikasi yang memadai sehingga keduanya mengambil sikap berdasarkan informasi-informasi yang tidak akurat bahkan padat sentimen negatif.

Ada beberapa sumber teori prasangka yang biasa diajukan, diantaranya yang populer adalah Teori Kebencian Terhadap Perbedaan, yang menunjukkan bahwa orang

memang memilih untuk berkumpul dengan mereka yang sama dan membenci mereka yang berbeda.

Teori prasangka lain yang terkenal adalah Teori Perbedaan Kepentingan. Dua kelompok sosial yang semula biasa berkoeksistensi hidup berdampingan tanpa saling mengganggu tiba-tiba jadi saling bermusuhan karena kepentingan yang berbeda. Biasanya kepentingan ekonomi politik, tetapi bisa juga sosial kultural, maupun religi (Jatman, 2002:121-122).

## BAB III

### TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### 3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian sejarah ini berusaha untuk mengungkap dan mendeskripsikan salah satu segi hubungan yang tidak harmonis yaitu antara Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (VOC) dengan etnis Cina yang ada di Indonesia. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah terjadinya pembantaian etnis Cina di Hindia Belanda pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Adrian Volckenier tahun 1740-an. Dalam memahami hubungan-hubungan ini agar supaya dapat menghasilkan tulisan yang analitis, maka perlu dikaji mengenai hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya kasus pembantaian terhadap etnis Cina tersebut. Oleh karena itu secara rinci penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami hubungan antara Pemerintah Hindia Belanda (VOC) dengan etnis Cina pada masa kekuasaan kolonial Hindia Belanda di Indonesia.
2. Memahami kebijaksanaan-kebijaksanaan politik dan ekonomi yang ditempuh oleh Gubernur Jenderal Adrian Volckenier dalam hubungannya dengan etnis Cina.
3. Memahami penyebab dari terjadinya pembantaian terhadap etnis Cina pada tahun 1740-an.
4. Memahami dampak dari peristiwa pembantaian etnis Cina tahun 1740-an terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan kolonial Hindia Belanda pada masa-masa berikutnya.

### 3.2 Manfaat Penelitian

Pembantaian terhadap etnis Cina pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Adrian Volckenier merupakan titik awal dari terjadinya rasialisme terhadap etnis Cina dalam sejarah Indonesia. Dari sinilah sebenarnya sejarah awal munculnya sentimen antirasialisme terhadap etnis Cina sejak dari zaman kekuasaan VOC, bahkan dampaknya masih sangat terasa ketika Indonesia sudah merdeka. Tidak sedikit gerakan-gerakan anti-Cina ini terus berlanjut hingga sekarang ini. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa setiap terjadi pergantian kekuasaan di Indonesia orang-orang dari etnis Cina selalu menerima getahnya menjadi korban. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya terhadap ilmu sejarah tetapi juga bermanfaat terhadap kebijaksanaan pemerintah Indonesia terutama dalam hubungannya menangani gerakan pembauran antara golongan pribumi dengan golongan nonpribumi.

Dengan mempelajari sejarah dari pembantaian etnis Cina pada tahun 1740-an ini diharapkan juga dapat mendidik masyarakat supaya lebih dewasa dan berpikir jernih tentang penilaian yang selama ini negatif terhadap etnis Cina. Bagaimanapun etnis Cina dan penduduk pribumi Indonesia pernah mendapat perlakuan yang sama-sama kejam dari penjajah Belanda. Mereka dalam sejarah juga pernah berjuang untuk melawan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Dengan belajar dari pengalaman sejarah dari hasil penelitian ini diharapkan tidak lagi muncul sentimen negatif yang dapat menjurus pada gerakan-gerakan anti-Cina di Negara Indonesia, yang kadang-kadang tidak berdasarkan alasan yang jelas.

**BAB IV****METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Sejarah. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan (Kuntowijoyo, 1995:89).

Pemilihan topik yang membahas mengenai pembantaian etnis Cina pada masa kolonial Hindia Belanda tahun 1740-an ini banyak diilhami ketika peneliti membaca tulisan Dukut Imam Widodo yang berjudul: *Soerabaia Tempoe Doeloe*. Dari sinilah peneliti berusaha untuk menelusuri sumber-sumber sejarahnya. Sumber sejarah ialah bahan-bahan yang dapat dipakai mengumpulkan informasi subjek. Usaha menelusuri subjek dan mengumpulkan informasi mengenai subjek itu menjadi tugas sejarawan. Kegiatan ini dalam ilmu sejarah disebut *heuristic* (Yunani) dari asal kata *heuriscain* yang berarti mencari (Hugiono, 1986: 30).

Tulisan ini kebanyakan menggunakan sumber sekunder. Yang dimaksud dengan sumber sekunder di sini adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Biasanya sejarawan harus bertumpu kepada sumber sekunder yang berasal dari buku-buku tangan kedua sejarawan lain, untuk memperoleh pengetahuan mengenai latarbelakang yang diperlukan guna mengenali dokumen-dokumen sejaman. Suatu persyaratan untuk menggunakan sumber sekunder ini yaitu perlunya diuji dan dikoreksi



dengan menganalisa secara kritis terhadap kesaksian dokumen-dokumen sezaman untuk menghindari dokumen yang palsu atau yang menyesatkan.

Adapun tujuan dari menggunakan karya sekunder adalah:

1. Untuk menjabarkan latar belakang yang cocok dengan bukti sezaman mengenai subjeknya, tetapi harus bersedia untuk menyangsikan dan meluruskan pertelaan sekunder, bilamana analisa kritis terhadap saksi-saksi sezaman memerlukan itu.
2. Untuk memperoleh petunjuk bibliografi yang lain.
3. Untuk memperoleh kutipan atau petikan dari sumber-sumber sejarah atau sumber-sumber yang lainnya, jika mereka tidak dapat diperoleh secara lebih lengkap di tempat lain dan senantiasa dengan sikap skeptis terhadap sikap akuratnya, terutama jika mereka diterjemahkan dari bahasa lain.
4. Untuk memperoleh interpretasi dan hipotesa mengenai masalah itu, tetapi hanya dengan tujuan untuk menguji atau untuk memperbaikinya dan tidak dengan maksud menerimanya secara total (Hugiono, 1986:32-33)

Makin jauh waktu sumber-sumber sekunder dari peristiwa-peristiwa yang dikisahkan semakin dapat dipercaya. Hal demikian bukan hanya karena sikap tidak memihak lebih mudah bagi periode-periode yang jauh di dalam sejarah, melainkan juga karena dengan bertambahnya jarak waktu, lebih banyak materi yang mungkin tersedia.

Buku-buku yang dijadikan sumber sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah buku "*Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa 1725-1743*" karya Willem Remmelink, "*Tionghoa dalam Pusaran Politik*" karya Benny G. Setiono,

"*Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa*" karya Liem Twan Djie, "*Sejarah Indonesia Modern*" karya Ricklefs, dan buku "*Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa*" karya Aminuddin Kasdi.

Selain sumber-sumber sekunder, dalam penelitian ini juga digunakan sumber primer yang berupa foto dan peta.

Tahap penelitian selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Agar penelitian ini lebih objektif maka sumber yang terkumpul harus diuji otentisitasnya, terutama menyangkut materi informasinya. Kritik sumber dilakukan dengan cara melakukan *cross check* terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh dan menganalisanya. Dalam menganalisa sumber-sumber digunakan teori-teori atau konsep-konsep pendekatan ilmu sosial sebagai alat bantu. Tahap terakhir adalah tahap penulisan di mana peneliti menyajikan hasil penelitian sejarah dalam bentuk tulisan secara kronologis (Kuntowijoyo, 1995:102).

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Sejarah Masuknya Orang Cina di Indonesia dan Aktivitas Perdagangannya

Dalam mengupas mengenai kapan orang Cina mulai masuk di Indonesia, hingga kini banyak para sejarawan yang memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Dalam sejarah Indonesia kuno, seperti diberitakan dalam sumber-sumber Cina, orang yang dianggap pertama kali datang ke Jawa adalah Fa Hien (sekitar abad ke-5 M) (Twan Djie: 1995:21-22). Akan tetapi bukti-bukti arkeologis berupa keramik dari periode Dinasti Han (225 SM-150M) yang ditemukan oleh Orsoy de Flines di Ujung Banten bagian barat pada tahun 1936 mengukuhkan anggapan bahwa orang-orang Cina di sekitar abad ke-1M telah melakukan kontak dagang dengan Jawa. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang Cina telah datang ke Jawa untuk berdagang jauh sebelum Fa Hien.

Berita yang lebih pasti perihal perdagangan Cina di Jawa dapat ditemukan dalam catatan Dinasti Sung II (960-1279). Disebutkan di dalamnya bahwa para utusan datang ke Cina dan sebaliknya. Pada masa itu tampaknya telah ada hubungan dagang dan diplomatik antara Cina dengan Jawa.

Pada masa keemasan Majapahit di sepanjang abad ke-14, orang-orang Jawa telah terbiasa dengan barang-barang mewah yang diimpor dari Cina seperti sutera, porselin, dan barang-barang sampan (*g*). Sementara itu masyarakat Cina berhasil memantapkan posisi mereka di sepanjang pantai utara Jawa. Dalam waktu bersamaan mereka juga melakukan perkawinan antar-golongan maupun antar-penduduk setempat. Dalam hal ini

tidak mustahil bila salah satu penguasa Majapahit ada yang menikahi atau memiliki selir dari kalangan perempuan Cina. Raden Patah sendiri menurut sumber-sumber babad dikatakan sebagai keturunan Cina yang berasal dari perkawinan jenis ini . Seperti Raden Patah tidak jarang orang-orang Cina peranakan itu kemudian memeluk Islam. Masyarakat Cina tampaknya banyak berperan dalam munculnya kerajaan-kerajaan Islam, proses penyebaran Islam di Jawa dan proses perkembangan kota-kota pelabuhan yang tumbuh di pantai utara Jawa pada abad ke-14 hingga ke-15 (Kasdi, 2003:298)

Pusat-pusat perdagangan Cina yang penting pada masa itu antara lain Japara, Pakalongan, Gresik, dan Surabaya. Barang dagangan mereka misalnya barang kelontong bertaraf internasional yang berkualitas tinggi. Barang-barang yang disebut kelontong itu antara lain: sutera, porselin, obat-obatan, gula, mata uang, dan barang-barang seperti cengkeh, pala, lada, kayu besi, emas, permata, penyu, burung, dan timah. Perdagangan itu dilakukan dengan cara barter atau uang tunai.

Menurut Chau Yu Kua, Chu Fan Chih mengemukakan bahwa para pedagang Cina pada masa itu juga menggunakan uang tembaga Cina yang disebut Cassy atau kepeng sebagai alat pembayaran. Jenis mata uang itu pada abad ke-15 hingga ke-17 merupakan salah satu komoditas penting yang diperdagangkan di Asia. Jaringan perdagangan mata uang terpenting pada abad ke-16 hingga ke-18 ialah Meksiko (khususnya dari pelabuhan Acapulco)-Manila-Cina-Asia Tenggara-Indonesia. Dari Manila jalur itu bercabang ke Asia Tenggara dan Jepang.

Perdagangan berlangsung berabad-abad lamanya di sepanjang kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa. Wilayah itu merupakan sumber pendapatan tahunan yang sangat penting bagi Mataram. Orang-orang Cina berhasil menguasai ekspor beras dan

kayu jati. Sultan Agung (1613-1646) sendiri pernah menggunakan jasa orang-orang Cina untuk mengatur ekspor komoditas beras itu ke Batavia. Namun, hubungan antara para penguasa Mataram dengan Cina tidak selamanya berjalan mulus. Ketika Amangkurat I (1646-1677), pada 1653 memblokade Pulau Bali, dia memerintahkan semua pedagang Cina untuk menghentikan hubungan dagang mereka dengan pulau ini. Namun perintah dari sunan itu tidak dihiraukan. Mereka juga tidak memperdulikan larangan sunan untuk menghentikan pelayaran pantai di sepanjang pesisir utara Jawa (Kasdi, 2003:301-302).

Dalam sistem perdagangan terbuka pada abad XVI peranan pedagang Indonesia dan pedagang Asia bersifat komplementer, hal mana bertalian erat dengan saling ketergantungan antara perdagangan rempah-rempah, bahan makanan, dan komoditi lainnya, seperti bahan pakaian, pecah-belah, dan lain-lain. Meskipun perdagangan sebagian besar lebih tertuju ke Manila, tetapi peranannya di Indonesia pada masa itu cukup menonjol. Dalam perdagangan lada di Banten dan Jambi peranan pedagang Cina menjadi faktor penting sehingga merupakan rintangan bagi usaha VOC. Kedudukannya sebagai penebas dan perantara tercermin dari volume perdagangan yang dapat dikuasainya, yaitu pada tahun 1598 jung Cina mengangkut 18.000 karung lada, sedang kapal Gujarat hanya 3000 karung, dan kapal Belanda 900 karung. Menurut laporan Belanda volume perkapalan Cina yang terdapat di Banten berjumlah 8 sampai 10 jung dengan muatan maksimum 50 ton; di samping ada informasi lain yang menyebutkan bahwa setiap tahun ada lima sampai delapan jung dengan muatan 80 sampai 100 ton. Jadi terdapat muatan minimum 400 ton maksimum 800 ton setiap tahun. Kecuali lada, pedagang Cina juga memegang perdagangan pala, cengkeh, kayu cendana, dan lain-lain.

Selaku penebas mereka mempekerjakan “budak-budak” untuk mengumpulkan bahan-bahan seperti lada dan beras (Kuntowijoyo, 1992:79).

Pengaruh Cina di Banten besar, oleh karena ada di antaranya yang menduduki jabatan resmi dalam kerajaan, dalam administrasi, pemegang pembukuan perbendaharaan raja, tukang timbang, juru bahasa, dan sebagainya. Dalam situasi seperti itu usaha VOC memborong lada di Banten ditentang oleh Cina, dengan alasan bahwa mereka dan pedagang asing lainnya perlu mendapat bagiannya. Lagi pula Belanda dikenakan bea-cukai lebih tinggi dan permainan harga. Kesemua tindakan itulah yang mendorong Belanda bertindak terhadap pedagang Cina. Tindakan itu antara lain berupa penyitaan kapal dan penumpang Cina lalu diangkut ke Batavia. Dengan taktik embargo dan blokade penyitaan atau manipulasi harga, VOC berhasil merebut perdagangan lada dari tangan Cina di Jambi dan Palembang. Di Banjarmasin ekspor lada masih dikuasai Cina. Oleh karena itu tidak ada kekuatan politik yang mendukungnya, kompetisi dari pihak Cina dapat diatasi tanpa banyak menimbulkan perlawanan. Di Banten ada pertentangan pedagang Cina yang pro-Belanda, seperti Sim Suan dan Lim Lakko dengan golongan yang memusuhi perdagangan VOC, khususnya politik monopolinya. Kemudian setelah monopoli menjadi kenyataan, kedudukan mereka sebagai perantara sangat dimanfaatkan oleh Belanda, tidak hanya karena ketrampilannya yang sudah menjadi tradisi, akan tetapi juga karena status sosialnya sangat memungkinkan peranan tersebut. Di samping itu perdagangan Cina belum dapat diberantas sama sekali, oleh karena VOC masih membutuhkan komoditi yang didatangkan dengan kapal mereka (Kartodirdjo, 1992:80). Dalam hal ini ternyata politik VOC terhadap perdagangan Cina berubah-ubah dan



disesuaikan dengan situasi tertentu. Politik terhadap hubungan perdagangan yang berubah-ubah juga terjadi antara Cina dengan Mataram.

Sebenarnya Mataram dan VOC sama-sama membutuhkan jasa perantara orang-orang Cina dalam kegiatan perdagangan mereka. Jika Amangkurat memanfaatkan orang-orang Cina guna mencapai tujuan politik dan ekonomi, VOC juga mengambil keuntungan dari kecakapan orang-orang Cina sebagai pedagang untuk menyaingi dan memojokkan perdagangan lada atau mrica yang berpusat di Banten dan perniagaan beras di semenanjung pantai utara Jawa. meskipun VOC berusaha menarik kegiatan perdagangan mereka ke Batavia. Kecakapan dagang orang-orang Cina itu juga diakui oleh Johan Nieuhof yang mengunjungi Batavia pada tahun 1654. Bahkan VOC menugaskan Nieuhof sebagai kepala rombongan utusan ke Cina. Strategi lain yang diterapkan VOC adalah menjadikan para produsen lada lokal tergantung kepada tersedianya picis (uang tunai) sebagai alat pembayaran yang dibuat oleh orang-orang Cina atas izin VOC. Sebelum kedatangan bangsa Belanda di Indonesia jumlah perdagangan lada tidak kurang dari 9,3 millium pon (9.300.000). Bagian terbesarnya dieksport ke Cina dan sebagian kecil sisanya dijual ke India. Kedatangan orang-orang Barat ke Indonesia membuat hubungan dagang yang selama ini dilakukan melalui perdagangan berantai berubah menjadi hubungan dagang langsung antara Indonesia dengan Eropa Barat dan Eropa Utara (Kasdi, 2003:302).

## **5.2 Kebijakan-Kebijaksanaan VOC terhadap Orang Cina**

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa politik Pemerintah Hindia Belanda terhadap orang-orang Cina berubah-ubah dan disesuaikan dengan situasi tertentu. Pada

awalnya hubungan antara orang-orang Belanda dengan orang-orang Cina sangat baik. Orang-orang Cina dan perdagangannya sangat dihargai. Menurut Vermeulen hal ini disebabkan oleh semangat dagang dan usaha yang dimiliki oleh imigran Cina itu, demikian pula karena kesediaannya menerima tamu serta kecenderungannya mengadakan jamuan makan dan sikap ramah dalam pergaulan. Hal-hal inilah yang membuat orang-orang Cina lebih menarik hati bagi orang Belanda jika dibandingkan dengan orang Jawa atau orang-orang dari bangsa lainnya.

Selanjutnya dalam jurnal perjalanan kapal Belanda ke Hindia Timur, dilukiskan oleh orang-orang Cina yang ada di Banten sebagai berikut:

“... begitu kami pertama kali bersauh di Banten, begitu mereka datang mengerumuni kami dengan banyak kapal setiap hari, seraya menjajakan dalam stan-stan barang-barang seperti sutera, sutera jahitan, porselin, sehingga tempat itu penuh dengan stan sampai-sampai kami tidak dapat berjalan.... Orang-orang Cina itu sangat gesit dan rajin dan mereka tidak segan bekerja dan tidak gentar menghadapi kesulitan. Sejak semula orang-orang Cina memperlakukan orang-orang Belanda dengan baik sekali (Vermeulen, 1938:4, dalam TwanDjie, 1995:29).

Ketika J.P. Coen berkuasa, ia sedapat-dapatnya berusaha agar kota ini dihuni oleh orang-orang Cina. Menurut dia orang-orang Cina itu dikenal rajin, tekun, tidak suka membawa senjata sehingga tidak perlu ditakuti. Coen berusaha memikat orang-orang Cina yang bermukim di Banten yang diperkirakan berjumlah 2000 orang agar mau pindah ke Batavia. Akan tetapi usaha Coen ini ini sempat digagalkan oleh Pangeran Banten. Pangeran menyadari bahwa pindahnya orang-orang Cina ke luar wilayahnya akan berakibat lumpuhnya perdagangan di Banten. Dalam menghadapi sikap keras dari penguasa Banten ini, maka Coen sempat memblokade perdagangan di Banten. Cara yang ditempuh oleh Coen ini tidak hanya berusaha menumpas mati Banten dan memindahkan perdagangan ke Batavia tetapi juga memaksa orang-orang Cina yang bermukim di

Banten berpindah ke Batavia. Blokade tersebut menghancurkan pasaran di Banten dan sama sekali melumpuhkan perdagangan dan hal ini mengakibatkan merajalelanya kemiskinan. Para pedagang Cina kemudian terpaksa mencari nafkah di tempat lain lalu datanglah mereka ke Batavia. Pada tahun 1619 bermukim di Batavia 3 sampai 400 orang Cina. Pada tahun 1620 sudah kurang lebih 900 orang Cina dan pada tahun 1627 bahkan 3500 orang Cina. (Twan Djie, 1995:30).

Perdagangan yang dilakukan orang Cina di Batavia selalu didorong oleh Coen dan dalam hal ini ia bekerja sama sepenuhnya. Tidak hanya sebagai pedagang orang Cina juga dianggap sebagai rekan. Orang-orang Cina itu sangat dihargai oleh Coen. Coen tidak dapat menerima apabila orang-orang Cina diperlakukan secara sewenang-wenang dan dipungut pajak yang keterlaluan. Setelah Coen berhenti dari jabatannya pada tahun 1623, ia memberikan kesaksian untuk orang-orang Cina, bahwa "tak ada orang lain di dunia ini yang lebih baik mengabdikan kepada kami dari pada orang Cina. Pengganti-penggantinya menyetujui pendapat ini dan tetap memperlakukan orang-orang Cina dan perdagangannya dengan baik

Pimpinan tertinggi kompeni pada tahun 1632 menulis perintah kepada Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia yang isinya agar semua orang Hindia diperlakukan dengan baik dan tidak diproses dengan tidak layak. Terutama orang-orang Cina harus diperlakukan secara hormat. Dengan perlakuan yang baik ini diharapkan orang-orang Cina akan berpihak kepada VOC, dengan demikian perdagangan di Batavia menjadi semakin berkembang. Perlakuan yang demikian juga ditempuh pada masa ketika Zwaerdecroon menjabat Gubernur Jenderal. Pada tanggal 21 Juli 1723 dikeluarkan perintah agar orang-orang Cina yang berdagang di Batavia diperlakukan dengan ramah dan sopan. Setelah

Gubernur Jenderal Zwaerdecroon yang bersikap baik terhadap orang-orang Cina mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1725, ia digantikan oleh para gubernur jenderal yang kurang simpati serta bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang Cina (Twan Djie, 1995:33).

### 5.3 Penyebab Terjadinya Pembantaian Etnis Cina Tahun 1740-an

Dalam catatan sejarah, orang-orang Cina sudah ada di Indonesia sebagai pedagang selama berabad-abad dan sejak tahun 1619 mereka sudah menjadi suatu bagian yang penting dari perekonomian Batavia. Di sana mereka aktif sebagai pedagang, tukang yang terampil, penggiling tebu, dan pengusaha toko. Pada tahun 1740 terdapat 2.500 rumah orang Cina di dalam tembok Batavia, sedangkan keseluruhan jumlah orang Cina di kota itu dan daerah-daerah sekitarnya diperkirakan tidak kurang dari 15.000 jiwa. Jumlah ini setidaknya merupakan 17 % dari keseluruhan jumlah penduduk di tempat itu. Ada kemungkinan bahwa orang-orang Cina sebenarnya merupakan unsur penduduk yang lebih besar jumlahnya, karena menurut sensus yang diadakan pada tahun 1778 kira-kira 26 % dari penduduk di daerah di luar tembok kota itu adalah orang-orang Cina dan pada periode pemerintahan Inggris kira-kira 24 % dari jumlah penduduk di dalam kota dan daerah-daerah pinggiran adalah orang-orang Cina. Pada tahun 1740 ada pula orang-orang Cina di kota-kota pelabuhan Jawa, walaupun jumlahnya hanya sedikit (Ricklefs, 1991:138).

Pada tahun-tahun berikutnya didorong oleh keinginan untuk memperbaiki kehidupannya, maka ribuan orang Cina berbondong-bondong meninggalkan tanah leluhurnya menuju Indonesia terutama di kota Batavia, Surabaya, Semarang, Pasuruan,

dan kota-kota pelabuhan lainnya. Dengan menggunakan perahu-perahu jung, mereka berlayar mengarungi lautan untuk mencari kehidupan baru di kota-kota Bandar itu.

Berpuluh-puluh tahun telah berlalu, lambat-laun roda kehidupannya berputar. Ternyata di kota-kota tersebut kehidupan orang-orang Cina itu semakin cerah. Ini dapat terjadi lantaran Kompeni memberikan fasilitas-fasilitas bisnis *pacht* dan perdagangan pada mereka. Didukung akan naluri dagang mereka yang tinggi maka mereka pun dapat menguasai hampir seluruh perekonomian yang ada di kota-kota tersebut. Keadaan semacam ini lambat laun menimbulkan kecemasan dan iri hati di kalangan bangsa Belanda. Sebagai penguasa ternyata kehidupan bangsa Belanda jauh di bawah bangsa Cina. Padahal bangsa Belandalah yang memberikan tempat bagi kehidupan mereka. Benih-benih iri hati pun tumbuh subur. Pemerintah Kumpeni Belanda lantas bersikap keras. Orang-orang Cina dicari kesalahannya dan ditangkapi. Lebih-lebih pada saat itu di Batavia Pemerintah Kumpeni juga baru dalam menghadapi kekacauan.

Pada bulan Desember 1721 VOC mengumumkan apa yang dinamakan suatu komplotan orang-orang Islam yang bermaksud melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Eropa yang berada di Batavia dengan dukungan Banten, Cirebon, Bali, Balambangan, dan Kartasura. Menurut dugaan pemimpinnya adalah seorang mestizo Batavia yang kaya yang bernama Pieter Erbevvelt. Dalam kasus ini empat puluh sembilan orang, termasuk tiga orang wanita dihukum mati secara kejam (Ricklefs, 1991:138 ).

Pada awal abad ke-18 perlakuan Belanda terhadap orang-orang Cina bertambah kejam dan korup. Namun karena tertarik dengan harapan-harapan kemakmuran, ribuan emigran Cina tetap terus membanjiri Batavia hingga meluas sampai ke pinggiran-

pinggiran kota. Sementara emigran Cina terus membanjiri Batavia, pada tahun 1730-an perdagangan VOC mengalami kemunduran karena sebagian besar modal VOC yang dipinjamkan kepada para penguasa setempat terinvestasi dalam bentuk wilayah teritorial. Akibatnya, beban keuangan untuk menyelenggarakan pemerintahan VOC di Batavia melampaui penerimaan yang terus-menerus mengalami defisit sehingga kesejahteraan warga kota Batavia menjadi merosot. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan itu, emigran Cina terus mengalir padahal perdagangan mereka justru mengalami kemunduran. Akibatnya, para pendatang yang tak tertampung di kota membanjiri kawasan di sekitar Batavia ( Kasdi, 2002:310).

Selain karena terlalu banyaknya pendatang dari Cina munculnya banyak pengangguran di kalangan mereka juga disebabkan karena terjadinya krisis dalam industri gula yang terjadi terutama sejak awal 1720. Habisnya sumber daya tanah dan hutan telah menekan industri ini dan kemudian ditambah lagi dengan kemunduran ekspor karena ditutupnya pasar Persia yang menguntungkan. Yang paling dirugikan adalah orang-orang Cina. Hampir semua pabrik gula dimiliki orang-orang Cina dan dikerjakan oleh tenaga kerja Cina, terutama oleh emigran-emigran yang baru datang ke Batavia karena tertarik oleh industri ini. Sebagian besar dari komunitas Cina juga tergantung secara langsung maupun tidak langsung pada industri ini. Naiknya angka pengangguran dan merebaknya bandit menciptakan sebuah masalah yang tak tertangani (Rommelink, 2003:163)

Tidak semua pendatang Cina mendapat pekerjaan yang layak. Mereka kemudian bergabung dengan gerombolan-gerombolan penjahat yang melakukan aksinya di sekitar Batavia. VOC menggunakan itu sebagai alasan untuk mengeluarkan surat izin bermukim

(*permissiebrieffies*) atau lisensi bagi emigran Cina dengan biaya dua ringgit Spanyol (Rds.2,-). Pada tahun 1727, VOC bermaksud membatasi masuknya emigran Cina dengan mengeluarkan peraturan bahwa semua orang Cina yang telah bermukim selama 10-12 tahun di Batavia harus memiliki *permissiebriffies* atau lisensi. Jika mereka tidak memilikinya maka mereka akan dideportasi ke Cina. Pada tahun 1729, mereka diberi kesempatan selama enam bulan untuk mengajukan permohonan bermukim di Batavia dengan biaya Rds.2,- per orang. Pada 1730, VOC melarang orang-orang Cina untuk membuka penginapan dan warung candu di dalam maupun di luar kota. Pada tahun 1736 dilakukan pendaftaran orang-orang Cina yang tidak memiliki *permissiebriffies*. Namun dalam pelaksanaannya peraturan ini menimbulkan penyimpangan, pemerasan, kesewenang-wenangan, dan korupsi (Rommelink, 2002:162). Sebagai misal dalam hal ketidakcocokan jumlah antara pemborong pendaftaran dan nahkoda kapal yang bertanggung jawab mengangkut emigran. Masalah tersebut menjadi salah satu sebab meluasnya kegelisahan di kalangan masyarakat Cina di Batavia dan sekitarnya.

Di Batavia pada bulan April hingga Juni 1740, muncul skandal penjualan *permissiebrieffies* oleh pegawai VOC ke perkebunan-perkebunan gula yang banyak menampung emigran gelap Cina di Batavia *Ommelanden*. Skandal penjualan surat izin itu terbongkar dan memaksa pemerintah VOC mengajukan rancangan peraturan lainnya sebagai upaya penyelesaian emigran Cina secara tuntas. Intinya VOC akan melakukan emigrasi paksa bagi orang-orang Cina yang tidak memiliki pekerjaan jelas dan tidak memiliki *permissiebrieffies*. Mereka akan dibuang ke Ceilon atau Srilangka dan Tanjung Harapan ( Kasdi, 2003:313).

Pada zaman pemerintahan Gubernur jenderal Diederik Durven (1729-1732), ada sebuah catatan mengerikan sebagai berikut:

“Adalah sebuah pemandangan yang biasa, jika ada seorang Tionghoa yang bersalah, maka serdadu-serdadu Kompeni akan memberikan hukuman sesuka hatinya. Di mana ia akan diikat pada sebuah tiang. Kemudian orang yang malang itu tubuhnya akan dicacah dengan pedang dan tombak sampai akhirnya ia akan mati sendiri (Dukut:2002:59).

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Adrian Volckenier, pernah dikeluarkan suatu resolusi “bunuh atau lenyapkan”. Resolusi ini memerintahkan bahwa semua orang Tionghoa yang mencurigakan tanpa peduli apakah mereka mempunyai surat izin atau tidak harus ditangkap dan diperiksa. Apabila mereka ternyata tidak mempunyai penghasilan atau menganggur, mereka harus dipulangkan ke Tiongkok atau dibuang ke Ceylon (Srilangka) dan Tanjung Harapan untuk dipekerjakan diperkebunan dan pertambangan sebagai kuli.

Ternyata kebijaksanaan ini menimbulkan implikasi yang sangat negatif. Ribuan orang Tionghoa bukan hanya pengangguran dan bandit-bandit kriminal, tetapi para pedagang dan orang baik-baik lainnya juga ikut ditangkap dengan paksa dan dengan menggunakan kekerasan, lalu dimasukkan ke kapal-kapal yang akan membawanya ke Ceylon dan Tanjung Harapan. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap rumah-rumah orang-orang Tionghoa dengan dalih mencari senjata seringkali disertai dengan penganiayaan dan perampasan barang-barang berharga miliknya.

Para pejabat Kompeni Belanda juga menggunakan kesempatan itu untuk memeras para orang Tionghoa kaya yang dimintai uang dalam rangka mendapatkan surat izin, untuk kepentingan sendiri. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Tionghoa (Benny : 2002:111), Suatu ketika tersiar kabar bahwa orang-orang Cina tersebut

tidak dikembalikan ke daratan Tiongkok, akan tetapi mereka dirantai dan dibunuh dengan cara yang amat kejam, yaitu dengan cara dilemparkan ke tengah laut ketika kapal-kapal yang mengangkut mereka mengarungi Samudera Hindia. Mengenai hal ini dapat kita kutip dari salah satu tulisan *The Boen Liang* sebagai berikut:

“... ada ketahuan tatkala Adrian Volckenier menjadi Gouverneur Generaal atawa Wali Negri Agung, tela timbul kegemparan besar. Pamerintah Agung kaluarkan prentah buat tangkep dan jeblosken dalem bui sagala orang Tionghoa yang tiada ada mempunyai pencaharian. Di antara orang-orang Tionghoa tersiar kabar, orang-orang Tionghoa tangkepan bukan dibawa ka Ceylon, tapi dilempar dalem laut...”. (dikutip dari Dukut, 2003:60).

Berita yang mengerikan itu akhirnya tidak hanya terdengar di Batavia saja, tetapi telah menyebar ke daerah-daerah lain seperti Surabaya Semarang, dan daerah-daerah lain yang banyak memiliki penduduk Cina. Kemarahan bangsa Cina terhadap Pemerintah Kumpeni tidak dapat dibendung lagi. Mereka kemudian menghimpun kekuatan dan mengadakan perlawanan-perlawanan terhadap penguasa Belanda.

Bentrokan pun semakin meluas, dan penangkapanpun semakin menjadi. Banyak orang-orang Tionghoa yang lebih suka menyingkir ke luar kota . Akan tetapi adapula yang berusaha menyogok para serdadu Kumpeni agar mereka tidak ditangkap dan tetap diperbolehkan tinggal di kota tersebut. Mereka yang menyatakan berontak terhadap Kompeni segera menghimpun kekuatan dengan laskar-laskar pribumi yang sebelumnya sudah banyak yang berkeliaran di pinggiran kota.

Situasi semakin menjadi tegang. Para orang Tionghoa yang telah berkumpul dan membentuk berbagai kelompok mempersenjatai diri untuk membela diri dan melawan perbuatan Kumpeni yang sewenang-wenang tersebut.

#### 5.4 Jalannya Pembantaian

Pada akhir September 1740 keadaan sudah menjadi semakin kacau. Pada saat itu telah tersiar kabar bahwa di daerah pedesaan sekitar Batavia telah tampak gerombolan-gerombolan Cina yang mendekati pintu gerbang Batavia, Mr. Cornelis, Tangerang, de Qual, dan Bekasi. Pada hari-hari berikutnya gerombolan menjadi semakin besar, sehubungan dengan itu pos-pos di Bekasi, Tanah Abang, Angke, dan Noordwijk mulai diperkuat.

Pada tanggal 7 Oktober pasukan bantuan yang dikirim ke Tangerang diserang oleh segerombolan orang Cina di dekat Kaduwang. Sebagian mati terbunuh, sedang 4 orang serdadu Belanda dapat menyelamatkan diri. Pada pagi itu juga pos de Qual diserang oleh gerombolan yang terdiri kurang lebih 300 orang dan banyak korban berjatuhan. Sementara itu detasemen yang dikirim ke Bekasi seluruhnya terbunuh (Kartodirdjo, 1998:223) Selain itu pada tanggal yang sama sekelompok orang Tionghoa yang terdiri dari ratusan orang melawan dan merebut posisi Kumpeni Belanda di Meester Cornelis dan Tanah Abang dan berhasil membunuh 50 orang serdadu Kompeni. Melihat hal ini maka Van Imhoff berusaha membalas serangan. Dengan kekuatan yang terdiri dari 1.800 orang serdadu Kumpeni yang merupakan kekuatan dari seluruh kekuatan di Batavia, ditambah dengan *schutterij* (penjaga sipil/milisi) dan 11 batalion *pennist* (batalion wajib militer), Van Imhoff mulai melakukan operasi pembersihan. Jam malam diberlakukan secara ketat terhadap semua penduduk Tionghoa dan persiapan untuk suatu perayaan Tionghoa secara besar-besaran dibatalkan (Benny, 2002:112).

Dari mana-mana telah diberitakan bahwa gerombolan-gerombolan Cina sedang bergerak. Kabar angin itu menimbulkan kegelisahan di kalangan penduduk Batavia. Pada

tanggal 8 Oktober diketahui pula bahwa ada gerakan masuk kota dan pengangkutan wanita dan anak-anak ke luar kota. Pemerintah Kumpeni segera mengeluarkan maklumat, bahwa pengangkutan ke luar kota dilarang,. Alat senjata harus diserahkan kepada penjagaan Kumpeni dan jam malam ditingkatkan. Pengamanan yang demikian sebenarnya hanya menambah keresahan saja dan rupanya sudah terlambat. Pada petang hari tanggal 7 Oktober gerombolan sudah ada di depan tembok kota dan penjagaan di diespoort telah diserang dan beberapa rumah dibakar.

Untuk mengatasi serangan dari gerombolan Cina ini maka pada tanggal 8 Oktober 1740 tentara Belanda memukul mundur suatu serangan balasan orang-orang Tionghoa yang cukup kuat di pinggiran kota. Melihat situasi makin resah, maka pada minggu pagi tanggal 9 Oktober Gubernur Jenderal Volckenier mengadakan rapat dengan para anggota Dewan Hindia. Jalan-jalan di kota sangat sepi dari orang-orang Tionghoa karena sehari sebelumnya telah diumumkan oleh gubernur Jenderal VOC berlakunya jam malam dan seluruh orang Tionghoa harus tinggal di dalam rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat sehingga mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Malahan mereka harus menghabiskan waktu malam hari dalam keadaan gelap gulita karena tidak diperkenankan untuk menyalakan api untuk penerangan sekalipun. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak dapat berhubungan dengan komplotan orang-orang Tionghoa yang berada di luar tembok kota yang diisukan akan “menyerang” kota Batavia. Di jalan-jalan hanya terdapat kerumunan orang-orang non-Tionghoa yang semakin lama semakin besar. Hampir setiap penduduk Batavia, kecuali orang-orang Tionghoa berada di jalan-jalan untuk menunggu suatu “tanda”. (Benny,2002:112).

Orang-orang non-Tionghoa ini berkumpul di sudut-sudut jalan membicarakan rumor terakhir yang menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa merencanakan untuk membunuh mereka semua dan memperkosa perempuan-perempuan serta menjadikan mereka dan anak-anak mereka menjadi budak. Kerumunan tersebut semakin membesar dan rumor tersebut telah membuat mereka marah dan menyatukan penduduk yang terdiri para kelasi, kuli, tukang, dan bahkan budak. Mereka memiliki tujuan yang sama yaitu menghadapi musuh bersama-sama yaitu orang-orang Tionghoa. Oleh mereka orang-orang Tionghoa dianggap sebagai kelompok yang eksklusif.

Di tengah-tengah situasi curiga, emosional, dan panas inilah tiba-tiba terjadi kebakaran beberapa warung Tionghoa di kompleks pemukiman orang-orang Tionghoa di daerah Kali Besar Oost. Hal ini oleh orang-orang Belanda diartikan sebagai tanda dimulainya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa. Kerusuhanpun terjadi dan penjarahan serta pembakaran rumah-rumah orang Tionghoa berlangsung dengan kejam. Tentara Belanda dibantu dengan orang-orang Eropa lainnya, para kelasi kapal, para gelandangan, para tukang dan budak menyerbu rumah-rumah orang Tionghoa setelah merampok harta bendanya. Mereka lalu membunuh setiap orang Tionghoa, tidak peduli laki-laki atau perempuan, tua atau muda, bahkan anak-anak dan bayi yang sedang menyusui pun dibantai dengan sadis dan diluar batas perikemanusiaan. Termasuk pasien-pasien yang berada di rumah sakit dan 500 tahanan Tionghoa yang mendekam di penjara bawah tanah di *stadhuis* (sekarang Gedung Museum Sejarah DKI, Jalan Fatahilah 1 Jakarta Barat) (Shahab, 2002:90).

Setelah itu dilakukan pembakaran terhadap semua rumah orang Tionghoa. Banjir darahpun terjadi di mana-mana yang kemudian menimbulkan nama-nama tempat seperti

Angke di Batavia yang berarti kali merah karena banyak darah yang mengalir ke kali tersebut. Rawa Bangke di Meester Cornelis atau Jatinegara karena banyaknya bangkai orang-orang Tionghoa yang mengambang di rawa-rawa sekitar Jatinegara dan Tanah Abang yang berarti tanah merah karena dibanjiri darah orang-orang Tionghoa yang menjadi korban pembantaian.

Melalui tindakan pembantaian yang sangat kejam ini maka keadaan di dalam kota Batavia menjadi agak reda. Korban jatuh di pihak orang Cina dalam serangan itu diperkirakan mencapai kurang lebih 10.000 orang. Orang-orang Cina laki-laki, tua muda, bayi bahkan orang-orang yang sedang sakitpun juga ikut dibunuh sebagai sasaran pembantaian (Kasdi,2003:316).

Apabila keadaan dalam kota sudah reda, di luar masih ada gerombolan-gerombolan mondar-mandir, diantaranya di Kampung Melayu, Selapanjang, Tanjungpriuk, Sukapura, Kaliabang, dan Bekasi. Waktu bergerak ke pedalaman, di mana-mana gerombolan melakukan pembunuhan, pembakaran, dan perampokan. Pada awal November 1740 pusat konsentrasinya ada di Bekasi, Kaliabang, dan Pulau Gadung (Kartodirdjo,1992:224)

Untuk menghindari serangan Kumpeni gerombolan mulai mengundurkan diri ke pedalaman, antara lain ke Priangan. Sebagian gerombolan menuju ke Timur, maka pada pertengahan tahun 1741 pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai bergolak. Setelah meninggalkan Bekasi gerombolan menuju kearah Semarang. Gerombolan ini dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Khe Panjang. Tokoh ini oleh para petani tebu di sekitar Batavia sering disebut sebagai Oey Panko, keturunan seorang pangeran adipati di Cirebon. Kata "panjang" menjadi julukannya karena perlawanannya yang paling panjang

(lama) terhadap VOC di sepanjang pesisir Utara Jawa. Nama Khe Panjang kemudian dikenal juga dengan nama Ki Sapanjang ( Kasdi, 2003: 316).

Pada bulan Juni 1741 pertumpahan darah besar-besaran terjadi di Semarang dan bulan berikutnya di Gresik. Gerombolan ini dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Singseh. Gerombolan ini melakukan pencurian, perampokan, dan perlawanan terhadap Kumpeni ( Kartodirdjo, 1998:224).

Sebagian laskar Cina di Batavia ada juga yang kemudian menuju ke Surabaya. Pemimpin mereka bernama Tai Wan Swie, berhasil menghimpun kekuatan di kota ini. Tentang nama Tai Wan Swie ini banyak pendapat yang mengatakan merupakan nama samaran dari salah seorang Kaisar Tiongkok, Jong Tsing. Ia melarikan diri dari daratan Tiongkok karena singgasananya direbut oleh saudaranya sendiri yaitu Kian Long. Ia kemudian lari menuju ke Surabaya. Laskar pemberontak Cina ini dikenal sebagai kelompok prajurit yang militan dan tangguh. Sayangnya sampai sekarang belum ditemukan bukti sejarah sampai kapan perlawanan orang-orang Cina terhadap Kumpeni di Surabaya ini terus berlangsung (Dukut, 2002:63).

## **5.5 Tindakan-Tindakan Penyelesaian dan Kebijakan-Kebijakan VOC terhadap Etnis Cina Pasca Pembantaian**

Pembantaian yang dilakukan terhadap orang-orang Cina ini bukan saja mengejutkan pihak korban (dalam hal ini orang-orang Cina) saja, tetapi juga mengejutkan kalangan orang-orang Belanda sendiri. Pembantaian terhadap orang-orang Cina pada tahun 1740 telah terperangkap dalam permusuhan internal VOC yang paling tajam.



Gustaaf Willem Baron van Imhoff telah dipilih oleh Heeren XVII untuk memulihkan kekayaan VOC. Sejak kedatangannya di Batavia pada tahun 1740 telah memimpin kelompok yang menentang Gubernur Jenderal Volckenier. Peran apa yang sebenarnya dimainkan oleh kedua orang ini dalam kasus pembantaian orang-orang Cina sama sekali tidak jelas, tetapi Van Imhoff menyalahkan Volckenier atas semua kejadian tersebut.

Pada bulan Desember 1740 Volckenier menahan Van Imhoff dan mengirimnya ke negeri Belanda sebagai tawanan militer. Sementara itu sebelum mengetahui kejadian-kejadian tersebut dalam sidang Heeren XVII mengangkat Van Imhoff sebagai Gubernur Jenderal. Ketika Van Imhoff sampai di negeri Belanda, Heeren XVII segera mengirim dia kembali ke Batavia. Mendengar niat pengangkatan Van Imhoff sebagai gubernur jenderal maka Volckenier sakit hati dan meletakkan jabatannya lalu berlayar pulang ke negaranya. Pada bulan Mei 1743 kapal van Imhoff tiba di Batavia dan dia segera mengambil alih jabatan gubernur jenderal dari Johannes Thedens (gubernur jenderal sementara). Kemudian muncul perintah dari Heeren XVII yang isinya menawan Volckenier yang pada waktu itu baru singgah di Tanjung Harapan. Dia kemudian dibawa pulang kembali ke Batavia pada bulan November 1742 dan dipenjarakan di benteng Batavia (1742-1751) (Ricklefs, 1991:143).

Pemeriksaan Volckenier berlangsung berbelit-belit dan berkepanjangan sampai hampir 10 tahun lamanya. Volckenier mengajukan dokumen pembelaan yang demikian tebal sehingga tidak ada satu orangpun saat itu yang sudah sempat mempelajarinya. Akhirnya pada tanggal 20 Juni 1751 Volckenier meninggal dunia dan pemeriksaan terhadap dirinya ditangguhkan (Benny, 2002:124). Ada dua tuduhan pokok yang

ditujukan pada Volckenier. Yang pertama, bahwa ia dalam rapat Dewan Hindia tanggal 9 Oktober 1740 menganjurkan agar orang-orang Belanda “membasmi orang-orang Cina yang ada di Batavia”. Suatu anjuran yang menurut kebanyakan anggota Dewan Hindia merupakan suatu perbuatan biadab yang harus ditolak. Yang kedua, bahwa ia setelah rapat bubar memberi perintah pribadi kepada Sersan Mayor Hendrik Duurveld, komandan pasukan kastil Batavia untuk membantai semua orang Tionghoa dengan mengecualikan wanita dan anak-anak. Namun diduga perintahnya termasuk mengeksekusi semua wanita dan anak-anak (Benny, 2003:124).

Dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan ini maka Volckenier didakwa telah melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi hukuman mati oleh suatu pengadilan yang diatur Van Imhoff. Dia terhindar dari hukuman penggal kepala karena naik banding. Sahabat-sahabatnya di negeri Belanda juga mengajukan suatu gugatan atas namanya yang tetap belum terselesaikan hingga tahun 1760, setelah kedua pelakunya utama meninggal dunia: Van Imhoff pada tahun 1750 dan Volckenier pada tahun 1751 (Ricklef, 1989:143).

Dari seluruh anggota dewan, hanya ipar Volckenier, Vincent Helvetius yang membelanya. Keputusan bersalah baik sidang yang diadakan di Batavia maupun di negeri Belanda akhirnya ditunda bahkan kemudian dibatalkan dan tidak pernah dijalankan.

Pemerintah Belanda selain berusaha untuk menyelesaikan ke dalam dengan cara mengadili pihak-pihak yang bersalah, rupanya juga mengalami ketakutan terhadap reaksi balasan yang akan dilakukan pemerintah dan rakyat Tiongkok di daratan Tiongkok. Untuk itu maka mereka berusaha menjelaskan dan minta maaf terhadap kaisar Tiongkok mengenai kejadian pembantaian terhadap etnis Cina ini. Untuk mengantisipasi terjadinya

reaksi balasan, Dewan Hindia menulis surat kepada kaisar yang isinya meminta pengertian atas tindakan mereka terhadap “bandit-bandit” Tionghoa yang telah mengganggu ketenteraman penduduk Batavia, walaupun diakuinya bahwa banyak juga orang-orang Cina yang tidak bersalah telah menjadi korban.

Akan tetapi reaksi dari Kaisar Tiongkok yakni Kaisar Kian liong (1736-1795) di luar dugaan. Kaisar tidak marah-marah dan terhina, namun justru menjawab dengan pernyataan yang sangat menyejukkan bagi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Kaisar merasa prihatin bahwa warganya yang karena memburu kekayaan telah meninggalkan negaranya tanpa mengingat akan makam leluhurnya dan pantas mendapatkan hukuman yang layak. Reaksi dari kaisar yang demikian menyudutkan warganya yang dianiaya secara kejam di negara lain ini sangat berhubungan erat dengan kebijaksanaan Dinasti Qing terhadap etnis Cina. Pada awal kekuasaannya kebijaksanaan Dinasti Qing bermusuhan terhadap etnis Tionghoa. Sikap bermusuhan pada periode awal ini disebabkan oleh persepsi Dinasti Qing mengenai etnis Tionghoa. Pemerintah menganggap bahwa warga Cina yang pergi merantau karena mereka menolak untuk tunduk kepada pemerintahan Qing. Seorang sarjana warga Cina mengatakan bahwa kebijaksanaan ini merupakan bagian integral dari kebijaksanaan pintu tertutup Qing (Manchu). Qing yang jumlah penduduknya hanya satu juta jiwa, setelah menaklukkan rakyat Han yang berjumlah ratusan juta dan secara cultural lebih unggul daripada Qing hanya dapat menggunakan pemusatan kekuasaan untuk mempertahankan pemerintahannya. Kebijakan pintu tertutup merupakan alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika terdapat undang-undang yang dikenal dengan nama *Lai jin* (yang secara harafiah berarti larangan pergi ke laut), yang melarang warga Cina pergi ke

luar negeri dan kembali ke Cina dan bahkan melarang perdagangan maritim. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika pada tahun 1740, ketika tentara kolonial Belanda melakukan pembantaian massal terhadap etnis Cina, Kaisar Qian Liong menyatakan bahwa “orang-orang ini (orang-orang Cina yang merantau di Indonesia) adalah pelarian dari kekaisaran surga, mereka meninggalkan makam nenek moyang mereka dan mencari keberuntungan di luar negeri. Kekaisaran tidak tertarik pada mereka ( Suryadinata,1999: 230-231).

Selain berdampak secara politis pembantaian terhadap etnis Tionghoa ini juga sangat berdampak dalam terhadap bidang ekonomi. Roda perekonomian khususnya aktivitas perdagangan menjadi terhenti. Hal ini disebabkan karena orang-orang Cina merupakan pelaku perdagangan yang sangat penting. Peristiwa pembantaian masih sangat menimbulkan ketakutan dan trauma yang sangat mendalam bagi orang-orang Cina. Orang-orang Cina yang karena nasib baik terhindar dari pembantaian sadis belum berani melakukan aktivitas dan mereka lebih memilih berada di dalam rumah merenungi nasibnya. Berhentinya aktivitas perdagangan yang dilakukan orang-orang Cina ini menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan bahan makanan pokok terutama beras karena para pedagang Cina banyak yang meninggal atau menghilang ketakutan. Banyak barang-barang yang tidak dapat diperoleh lagi di pasaran sehingga harga-harganya menjadi semakin melonjak naik secara mengawatirkan ( Twan Djie, 1995:340). Disebabkan karena di bagian-bagian lain Pulau Jawa ketertiban masih belum dapat dipulihkan, maka beras hampir tidak dapat diangkut. Pemerintah dengan demikian terpaksa menjatah bahan-bahan makanan.

Tidak adanya orang-orang Cina kecuali banyak merugikan penduduk juga sangat merugikan Kumpeni sendiri. Perekonomian Kumpeni sendiri sangat menderita karena masalah ini. Oleh karena itu Pemerintah Kolonial Belanda berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan berbagai macam cara agar penduduk Cina di Batavia giat lagi berusaha. Akan tetapi untuk membatasi kekuatan orang Cina, pemerintah kolonial rupanya masih ketakutan sehingga orang-orang Cina masih dilarang bermukim di dalam kota. Beberapa hari setelah pembantaian Kumpeni kemudian secara resmi mengumumkan sebuah amnesti yang isinya semua orang (dari bangsa manapun) untuk memperlakukan orang-orang Cina dengan baik (Remmelink, 2002: 166). Mereka diberi sebidang tanah yang luas yang terletak di sisi Barat sungai di luar pintu pelabuhan sebagai tempat pemukiman yang tetap yang kemudian di kenal sebagai Kampung Cina. Pemukiman ini kondisinya sangat buruk. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapat berikut ini:

“Muara sungai itu adalah tempat kotor dan orang-orang Cina yang ditunjuk pemukimannya di sana merasa takut dan tak enak. Sedangkan kalau mereka berada di luar tempat itu, mereka dihina dan disakiti hatinya. Karena itu banyak dari mereka meninggal akibat merasa sedih dan sakit.” (Twan Djie, 1995:35)

Usaha-usaha pemerintah untuk menarik hati orang-orang Cina di atas rupanya tidak banyak menarik orang Cina. Oleh karena itu kemudian Pemerintah Kolonial Belanda berusaha menempuh cara lain dengan mengirim kapal-kapal ke Cina Selatan dengan maksud agar jung-jung Cina mau bersauh lagi di Batavia. Selain itu pemerintah pada tahun 1743 mulai memperbolehkan orang-orang Cina berada di dalam kota lagi mulai dari pukul enam pagi hingga enam petang demi meningkatkan perdagangan. Untuk mendorong orang Cina agar mau bermukim di pasar yang telah diusulkan Van

Imhoff, orang-orang Cina diperkenankan tinggal di tempat dalam kota bersama empat orang dewasa..

Meskipun sudah diberi “kemudahan-kemudahan baru”, rupanya orang-orang Cina banyak yang tidak tertarik lagi bermukim di Batavia. Mereka merasa tidak aman dan masih dihantui oleh trauma pada pembunuhan yang mengerikan. Orang-orang Cina tidak dapat melupakan kesadisan dalam peristiwa pembantaian.

Pada tahun 1749 ada perkembangan baru lagi perlakuan pemerintah kolonial terhadap etnis Cina. Orang-orang Cina mulai mendapat izin untuk bermukim di Batavia. Namun demikian, kebijaksanaan itu tidak selamanya dilakukan secara konsekuen. Pembatasan-pembatasan terhadap etnis Cina terus saja dilakukan dan mencapai puncaknya dengan diterapkannya peraturan *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel*.

*Wijkenstelsel* merupakan peraturan yang mengharuskan orang-orang Cina bermukim di tempat yang sudah ditentukan (*ghetto*). *Ghetto-ghetto* inilah yang kemudian berkembang menjadi daerah Pacinan dan diawasi atau dipimpin oleh *Wijkmeeter* (*loh-tia*) atau semacam ketua RT. Untuk dapat bepergian keluar dari daerah Pacinan, orang-orang Cina harus meminta surat izin (*passenstelsel*) dari penguasa Belanda melalui para opsir Tionghoa yang memang bertugas mengatur segala kepentingan anggotanya. Dalam sejarah tercatat beberapa opsir Cina itu, antara lain: Mayor Tan Engoan, Kapiten Ko Tjoenkiet, Kapiten Tan Kehoaij, Kapiten Tan Engkiau, Kapiten Tan Kamlong, Kapiten Tan Hongkak, Kapiten Ong Boenhian, Letnan Souw Tianpie, Letnan Oeij Kimcang, dan yang lainnya ( *Radar Surabaya*, 11 April 2001, hlm.8). Kedua peraturan yang sangat rasialis ini, menjadi awal pembelengguan kebebasan dan hak-hak politik etnis Tionghoa

di Indonesia, baik di zaman penjajahan Belanda maupun di zaman Republik Indonesia sekarang ini (Benny, 2002:128).

Meskipun latar belakang dan jalannya pemberontakan sudah diketahui, namun masih sedikit sekali yang sudah dikupas tentang para pemberontak itu sendiri. Korupsi dan teror yang dilakukan pegawai-pegawai Kumpeni, usaha untuk mendapatkan kambing hitam dan pertengkaran tiada henti dalam pemerintahan telah banyak dibahas, tetapi orang-orang Cina dan pemimpin mereka tetap merupakan misteri. Selain tokoh Khe Panjang (Oey Panko) dan Sin She, Kumpeni memang pernah mendakwa salah seorang tokoh yang dianggap bersekongkol dengan pemberontak yaitu Ni Hoekong. Dalam pemeriksaan yang berada di bawah tekanan, Ni Hoekong sendiri tidak banyak bicara atau tutup mulut sehingga dakwaan Kumpeni terhadap tokoh ini juga sangat lemah.

Selain tokoh-tokoh di atas Kumpeni juga pernah mengeksekusi tokoh pendekar yang sangat disegani masyarakat di sekitar Kawasan Glodok karena kesaktiannya dan kepandaianya bermain silat. Ketika terjadi huru-hara berdarah kapiten Tionghoa tidak dapat dijadikan andalan karena sifatnya suka menjilat gubernur jenderal. Akhirnya dalam kerusuhan yang paling menodai kota Batavia dan sekitarnya ini, orang-orang Tionghoa lebih suka mengadukan nasibnya kepada guru-guru silat di daerah Patekoan. Di antara delapan pendekar itu seorang diantaranya dikenal dengan sebutan Pak Item lantaran kulitnya gelap. Ia berayah seorang pribumi sedang ibunya bernama Mama Nio, seorang Tionghoa asli Kampung Pekapuran.

Dalam kasus ini Volckenier langsung saja memerintahkan pasukan-pasukan Kumpeni untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan dan menangkap ke delapan pendekar Patekoan hidup atau mati. Kedelapan pendekar berhasil ditangkap hidup-



hidup. Saat eksekusi di halaman depan (kini Museum Sejarah DKI), banyak pengunjung yang ikut bersedih. Kala itu setiap eksekusi baik berupa hukuman gantung maupun hukuman pancung selalu diumumkan kepada masyarakat luas agar mereka menyaksikannya (Shahab,2002:89).

Pengetahuan Kumpeni tentang bawahan Cinanya sangat minim dan Kumpeni juga tidak mencoba untuk lebih tahu dalam hal ini. Pada tahap-tahap awal pemberontakan Kumpeni memang mencoba mendapatkan informasi dari para tahanan, tetapi setelah terjadinya pembantaian, saksi-saksi ini dan orang-orang lain yang mungkin dapat dijadikan informan kebanyakan sudah mati. Setelah serangan-serangan terhadap Batavia berhasil dipatahkan dan amnesti diumumkan, ketakutan akan terjadinya kekacauan baru tidak memungkinkan dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh. Seluruh masalah ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, yang lebih baik cepat-cepat dilupakan oleh semua pihak yang terlibat. Akibatnya, pemberontakan ini, pemimpin-pemimpinnya, organisasinya, latar belakang, dan pemikiran yang ada di dalamnya, tetap sama misteriusnya seperti pada saat ketika Kumpeni menghadapinya. Bagi Kumpeni masalah ini lebih mirip sebuah bencana alam, yang tidak perlu dijelaskan tetapi jika sudah berlalu perlu disyukuri dengan doa dan pertobatan, seperti yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 1740 (Rommelink, 2002:165).

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Dari apa yang telah dijelaskan pada uraian di atas maka penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hubungannya dengan etnis Cina, kebijaksanaan VOC selalu berubah-ubah. Pada awalnya hubungan antara etnis Cina dengan Kumpeni Belanda sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari perlakuan-perlakuan maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Kumpeni khususnya di bidang perdagangan. Untuk mendorong roda perekonomian terutama di Batavia, VOC berusaha untuk menarik pedagang-pedagang Cina ke wilayah ini. Dengan adanya kemudahan-kemudahan tidak mengherankan banyak pendatang orang-orang Cina ke Indonesia.
2. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh VOC, maka etnis Cina akhirnya banyak menguasai perekonomian di Indonesia, bahkan dapat mengalahkan perekonomian orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Kondisi yang demikian inilah yang kemudian menyebabkan munculnya rasa tersaingi dan iri di kalangan Kumpeni. Oleh karena itu maka kemudian VOC berusaha untuk mengetrapkan berbagai peraturan dan tindakan yang bertujuan untuk membatasi masuknya emigran Cina yang terus bertambah dan membatasi perdagangan etnis Cina. Kebencian terhadap orang-orang Cina ini mencapai puncaknya dengan terjadinya pembantaian missal terhadap etnis cina pada tahun 1740-an.

3. Tindakan pembantaian terhadap etnis Cina pada tahun 1740-an merupakan tindakan paling kejam dalam sejarah hubungan antara antara VOC dengan etnis Cina di Indonesia. Tindakan ini merupakan titik awal terjadinya tindakan yang menjurus pada rasialisme terhadap orang-orang Cina di Indonesia. bukan hanya pada saat kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda bahkan sampai sekarang.
4. Dampak yang paling besar dan terasa pasca pembantaian terhadap etnis Cina ini adalah dengan dikeluarkannya dua peraturan yaitu *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel*. Kedua peraturan ini intinya membatasi aktivitas dan gerak orang Cina di Indonesia. Kedua peraturan ini dampaknya masih sangat terasa terus hingga sekarang meskipun Indonesia sudah lama merdeka.

## 6.2 Saran

Salah satu manfaat dari mempelajari sejarah adalah membuat orang semakin lebih bijak dalam menangani kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dihadapinya. Kejadian sejarah merupakan cermin dalam melakukan tindakan di masa kini maupun masa mendatang. Dengan demikian kesalahan-kesalahan yang telah terjadi tidak akan berulang kembali. Pembantaian terhadap etnis Cina di Hindia Belanda tahun 1740-an merupakan peristiwa yang paling pahit yang dialami oleh orang Cina dalam sepanjang sejarah colonial di Indonesia. Permasalahan hubungan dengan etnis Cina merupakan masalah yang pelik hingga saat sekarang ini. Dengan mempelajari terjadinya pembantaian etnis Cina pada tahun 1740-an ini maka sekaligus dapat menjadi masukan pada Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah hubungan antara warga “pribumi

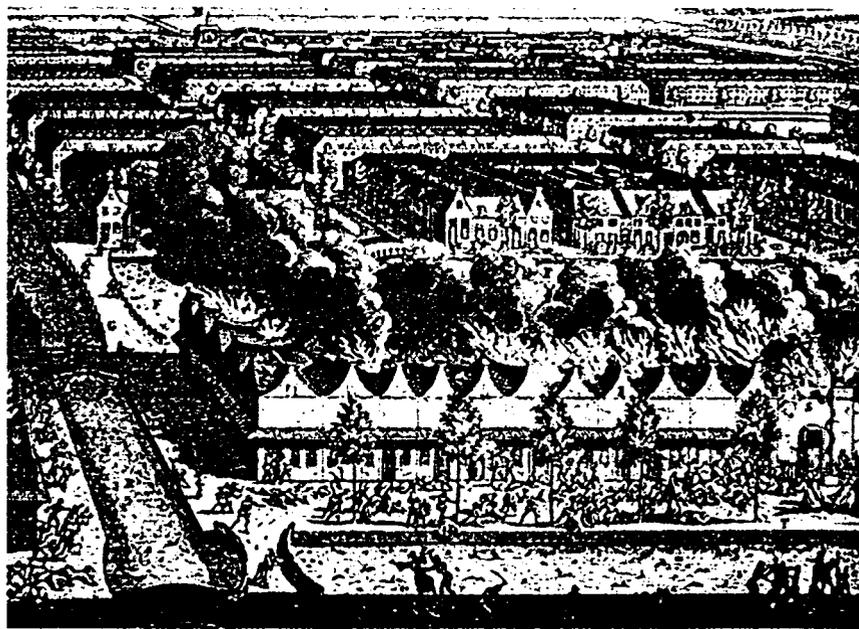
dan nonpribumi” yang seringkali menjurus pada gerakan-gerakan rasialisme anti-Cina. Masukan ataupun saran-saran tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya tindakan kekerasan terhadap etnis Cina sejak zaman penjajahan hingga sekarang lebih banyak dilatarbelakangi oleh masalah kecemburuan di bidang ekonomi. Oleh karena itu terjadinya gab antara kedua kelompok pribumi dan nonpribumi harus segera diperkecil dan mendesak untuk mendapat penyelesaian.
2. Hingga saat ini prasangka negative terhadap etnis Cina masih mewarnai dalam hubungan antar etnis di Indonesia. Kondisi yang demikian semakin diperparah oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah pada masa lalu yang cbanyak mengandung unsure membatasi hak-hak orang dari etnis Cina dalam berbagai bidang kehidupan. Tindakan pembatasan terhadap etnis Cina ini sebenarnya justru akan membuat jarak hubungan antara orang-orang pribumi dengan etnis keturunan Cina di Indonesia. Oleh karena itu tindakan-tindakan pembatasan ini harus segera diakhiri.
3. Bagi penduduk dari keturunan etnis Cina diharapkan harus segera lebih “membumi” dalam berhubungan dengan etnis-etnis lain yang ada di Indonesia. Tindakan-tindakan memilih-milih teman, pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya harus segera dihilangkan. Dengan cara ini maka kesan eksklusif terhadap etnis Cina akan segera berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Graaf, H.J. de, dkk, 1998. *Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI antara Historisitas dan Mitos*. Yogyakarta:
- Hok Ham, Ong. 2002. *Dari Soal Priayi Sampai Nyai Blorong: Refleksi Historis Nusantara*. Jakarta: Kompas.
- Hugiono dan Poerwantana. 1987. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Bina Aksara.
- Imam Widodo, Dukut. 2002. *Soerabia Tempo Doeloe*. Surabaya: Dinas Pariwisata.
- . 2001. "Belanda Terkesima, di Tangan Tionghoa Monopoli Jadi Sumur Uang" *Radar Surabaya*, 11 April 2001, hlm. 8
- . 2001. "Monopoli Merajalela, Belanda Memutuskan untuk Menghadapi." *Radar Surabaya*, 12 April 2001, hlm. 8.
- . 2001. "Orang-orang Tionghoa Diberi Pangkat Militer". *Radar Surabaya*, 10 April 2001, hlm. hlm.8.
- . 2001. "Yang Sakit Diseret dari Tempat Tidur dan Dibantai". *Radar Surabaya*, 13 April 2001, hlm.8.
- Jatman, Darmanto, 2002. "Tabir Gelap Kerusuhan Anti-Cina di Indonesia" dalam Pardede, Andreas, dkk. *Antara Prasangka dan Realita: Telaah Kritis Wacana Anti-Cina di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Inspirasi.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia.
- Kasdi, Aminuddin. 2003. *Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat- Daerah pada Periode Akhir Mataram (1726-1745)*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Lohanda, Mona, 2002. "Masalah Cina dalam Perjalanan Sejarah Indonesia" dalam Pardede, Andreas, dkk. 2002. *Antara Prasangka dan Realita: Telaah Kritis Wacana Anti-Cina di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Inspirasi.
- Pardede, Andreas, dkk. 2002. *Antara Prasangka dan Realita: Telaah Kritis Wacana Anti-Cina di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Inspirasi.

- Rommelink, Willem. 2002. *Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa 1725-1743*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rush, James R. 2000. *Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-Bandar Opium Cina: Indonesia Kolonial 1860-1910*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Setiono, Benny G. 2002. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: ELKASA.
- Shahab, Alwi. 2002. *Betawi Queen of the East*. Jakarta: Republika.
- Suryadinata, Leo. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Twan Djie, Liem. 1995. *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa: Suatu Studi Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yuanzhi, Kong. 2000. *Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*. Jakarta: Pustaka Populer Obor.



- Gambar etsa pemandangan pembantaian massal orang Tionghoa di Batavia pada 9 Oktober 1740 di mana semua rumah dan toko milik Tionghoa dijarah dan dibakar habis dan setiap orang Tionghoa yang dijumpai disiksa dan dibunuh.
- Pembunuhan para tawanan Tionghoa dalam penjara di Balai Kota pada 1740. Gambar ini ada dalam atlas van Stolk, Rotterdam.
- Gubernur Jendral Adriaan Valckenier (1695-1751) yang bertanggungjawab terhadap pembunuhan pada ribuan orang Tionghoa di Batavia pada 1740-1741.

( Sumber: Benny G. Setiono, 2002:120 )

**PERSONALIA PENELITIAN**

**1. Ketua Peneliti**

- a. Nama Lengkap dan gelar : Drs. Muryadi
- b. Golongan, Pangkat, NIP : IIIC, Penata, 132090176
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Jabatan Struktural : Ketua Jurusan Sejarah
- e. Fakultas/Jurusan : Sastra/Ilmu Sejarah
- f. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Keahlian : Sejarah Sosial
- h. Waktu untuk penelitian : 15 jam perminggu

**2. Tenaga Peneliti**

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Sukaryanto, M.Si
- b. Golongan, Pangkat, NIP : IIIA, Penata M. 132230681
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Jabatan Struktural : -
- e. Fakultas/ Jurusan : Sastra/Ilmu Sejarah
- f. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Keahlian : Sejarah Sosial
- h. Waktu untuk penelitian : 10 jam perminggu

**PAMERAN**

-1 JUN 2005

**MILIE  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**